



Judul : Bamsuet Desak Eksportir Jawab Tuduhan Dumping
Tanggal : Jumat, 12 Juni 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bamsuet Desak Eksportir Jawab Tuduhan Dumping

KETUA MPR Bambang Soesatyo mendesak eksportir dalam negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menanggapi tuduhan dumping dari sembilan negara mitra dagang Indonesia.

Ia berharap, para eksportir yang memiliki data terkait harga produk ekspor yang dituduhkan dumping bisa mementahkan tuduhan itu.

"Untuk menjaga hubungan baik dan kerja sama perdagangan dengan sembilan negara mitra dagang, eksportir Indonesia tak harus konfrontatif. Langkah atau pendekatan yang perlu segera dilakukan adalah membangun dialog dengan otoritas atau komisi anti-dumping dari masing-masing negara itu," ujar Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Diketahui, sembilan negara yang menuduh Indonesia melakukan dumping dan *safeguard* (menerapkan kebijakan pengamanan) adalah Amerika Serikat, India, Ukraina, Vietnam, Turki, Uni Eropa, Filipina, Australia dan Mesir. Kesembilan negara tersebut menginisiasi 16 tuduhan atas produk ekspor Indonesia, di antaranya mono sodium glutamat, baja, aluminium, kayu, benang tekstil, bahan kimia, matras kasur dan produk otomotif.

Melanjutkan keterangannya, Bamsuet mengatakan, dialog para eksportir dengan sembilan negara mitra dagang Indonesia, sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan masalah. Melalui jalur tersebut, harap dia, para eksportir dapat mempertanyakan sekaligus meminta bukti-bukti yang melandasi tuduhan dumping terhadap Indonesia.

"Saat dinamika perekonomian global nyaris stagnan akibat pandemi Covid-19,

merawat kerja sama perekonomian atau perdagangan dengan semua negara mitra jauh lebih penting dan strategis. Aspek positif dari tuduhan dumping itu menjadi bukti, masih ada permintaan atas sejumlah komoditi ekspor Indonesia oleh sejumlah negara," jelas politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Bamsuet mengingatkan, sisi positif dari tuduhan dumping dan *safeguard* harus dirawat semua pihak. Sebab, nilai ekspor dan investasi Indonesia diperkirakan tumbuh negatif selama pandemi global Covid-19.

"Saya berharap, para eksportir dan Kemendag segera berkomunikasi dengan komisi anti-dumping dari masing-masing negara itu. Cari data atau bukti tentang seberapa jauh produk ekspor Indonesia merusak atau menyebabkan kerugian bagi industri di negara-negara itu," tegas dia.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, kesembilan negara tersebut, sebenarnya bisa melakukan sejumlah upaya untuk menangkali masuknya produk ekspor yang diduga dumping harga. Di antaranya, memberlakukan atau menerapkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD), agar harga produk impor yang diduga dumping jadi jauh lebih mahal dari produk lokal.

"Penerapan BMAD sudah menjadi kesepakatan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, saya menduga, kemungkinan volume produksi industri sejenis di dalam negara mereka tak mampu memenuhi permintaan pasar atau konsumen. Karenanya, para importir di negara-negara itu berupaya memenuhi kebutuhan, mendatangkan produk-produk dari Indonesia karena harganya kompetitif," tandasnya. ■ (DN)